



SJMB: *Scientific Journal of Management and Business*.
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ; p-ISSN: 2776-009X ; online -ISSN: 2807-5897

Available online at <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sjmb>

Received: Agustus 2022	Accepted: September 2022	Published : Oktober 2022
------------------------	--------------------------	--------------------------

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada

Makarius Leo¹, Gabriel Tanusi², Lambertus Langga³

¹²³Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores

veideramosyovens@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini dilakukan di kantor Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dilihat dari (1) rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali, dimana kemandirian keuangan daerah kabupaten ngada masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. (2) untuk tingkat efektivitas keuangan Daerah Kabupaten Ngada tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah yang diterima. (3) untuk tingkat efisiensi Daerah Kabupaten Ngada kurang efisien dapat diartikan bahwa total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya. (4) untuk tingkat keserasian Daerah Kabupaten Ngada belum baik dikarenakan alokasi dana yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten Ngada untuk belanja modal lebih kecil dari pada alokasi dana yang dikeluarkan untuk belanja operasi.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah; Efektivitas; Efisiensi; Keserasian.

Abstract. *This study aims to determine the financial performance of the Ngada Regency*

Government. This research is a quantitative descriptive research, this research was conducted at the Ngada Regency Government Finance Agency office. Data collection using interviews and documentation. Data collection techniques used using the regional financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and harmony ratio. The results of this study indicate that the Financial Performance of the Ngada Regency Regional Government as seen from (1) the ratio of regional financial independence is very low, where the financial independence of the Ngada Regency is still very dependent on the central government. (2) for the level of financial effectiveness Ngada Regency is not effective in realizing the sources of local revenue received. (3) for the level of efficiency of the Ngada Regency Region Ngada Regency is less efficient, which means that its total regional expenditure is still greater than its regional income. (4) the level of compatibility of the Ngada Regency is not good because the allocation of funds spent by the Ngada Regency for capital expenditures is smaller than the allocation of funds spent on operating expenditures.

Keywords: *Local Government; Regional Financial Independence; Effectiveness; Efficiency; Compatibility.*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan Lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan value formoney yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Ngada, karena itu Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kabupaten Ngada berhasil menjalankan tugasnya atau tidak.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk

mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kesenjangan. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang di hadapi Kabupaten Ngada antara lain: (1) sumber pendapatan lebih besar bersumber dari pendapatan transfer, (2) rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil di bandingkan dengan pendapatan transfer. (3) rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk mendapatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.

Pemberlakuan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada seharusnya dapat memberikan keleluasaan dan keberanian agar mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan Kemandirian Daerah Kabupaten Ngada adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Kabupaten Ngada dalam bidang keuangan untuk kurung waktu tertentu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggalai dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Fitriya, 2012).

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

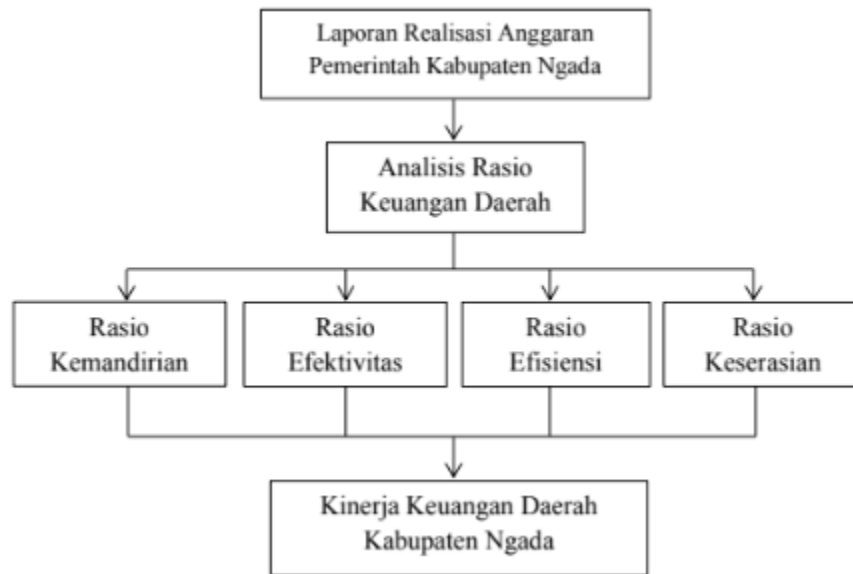
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan

atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2016):

Kerangka Pemikiran

Laporan realisasi anggaran dan belanja daerah akan dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan daerah. Analisis yang dilakukan adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngada dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada empat macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada: Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya dana bagi hasil, bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, pendapatan asli daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Analisis yang dilakukan adalah analisis rasio keuangan seperti yang dibahas sebelumnya oleh penulis. Hasil dari analisis rasio ini akan memperlihatkan kinerja keuangan daerah.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa dokumen resmi yang dimiliki pemerintah daerah seperti Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagada adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Daerah Kabupaten Ngada dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut ini merupakan tabel dari rasio kemandirian sebagai berikut:

Tabel 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Kemandirian Daerah
2017	62.338.200.371,68	760.748.819.002,00	8,19%	Rendah
2018	41.355.093.830,50	590.861.900.755,00	6,99%	Rendah
2019	51.258.423.809,39	653.824.186.756,00	7,83%	Rendah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Ngada tergolong rendah sekali, dimana kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali menunjukan pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan masih relatif kurang PAD yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada seperti bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada harus dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada, inisiatif, kreativitas dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan PAD.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio fektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
2017	65.253.752.165,00	62.338.200.371,68	95,53	Tidak Efektif
2018	51.121.989.495,00	41.355.093.830,50	80,89	Tidak Efektif
2019	50.835.854.938,00	51.258.423.809,39	100,83	Efektif

Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2017 dan tahun 2018 tergolong tidak efektif. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada belum mampu merealisasikan pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sedangkan di tahun 2019 efektivitas keuangan Daerah Kabupaten Ngada tergolong efektif. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada telah mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya melampaui target yang telah ditetapkan dengan baik. Namun untuk meningkatkan efektivitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada harus lebih mengoptimalkan penerimaan dari potensi yang telah ada dan perlu mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ini dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD	Kriteria
2017	731.004.770.125,14	823.087.019.373,68	82,81	Cukup Efisiensi
2018	739.148.645.073,46	761.773.721.395,50	97,02	Kurang Efisiensi
2019	829.096.229.321,51	838.573.810.001,39	98,86	Kurang Efisiensi

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada tahun 2017 tergolong cukup efisiensi karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 efisiensinya tergolong kurang efisiensi yaitu sebesar 97,02% dan 98,86%. Hal ini dikarenakan total belanja daerahnya masih lebih besar dari pada pendapatan daerahnya dengan indikasi adanya kecendrungan pemborosan anggaran. dalam menghadapi situasi yang seperti ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya dan harus lebih teliti lagi dalam menggunakan anggaran belanjanya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio keserasian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi (belanja tidak angsumg) ini untuk mengukur perbandingan antara total belanja operasi (belanja tidak lansung) dengan total belanja daerah.

Tabel 3
Rasio Belanja Operasi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Belanja Operasi
2017	681.613.666.177,48	412.412.641.120,20	60,50
2018	739.148.645.073,46	432.406.166.059,00	58,50
2019	829.096.229.321,51	652.490.958.953,34	78,69

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diketahui bahwa rata-

Rata rasio keserasian belanja opsasai Badan Keuangan Pemerinntah Daerah Kabupaten Ngada mengalami ketidakstabilan dalam mengelolah belanja daerah. Dimulai pada tahun 2017 dimana rasionya sebesar 60,50%, menurun pada tahun 2018 menjadi 58,50%, dan mengalami peningkatan lagi menjadi 78,69% pada tahun 2019.

2. Rasio Belanja Modal (Belanja Langsung)

Rasio belanja modal (belanja langsung) ini untuk menghitung perbandingan antara total belanja modal (belanja langsung) dengan total belanja daerah.

Tabel 4
Rasio Belanja Modal Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2017	681.613.666.177,48	268.221.134.057,28	39,35
2018	739.148.645.073,46	306.742.479.014,46	41,49
2019	829.096.229.321,51	176.113.229.722,17	21,24

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diketahui bahwa rata- rata rasio keserasian belanja modal Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada mengalami ketidakstabilan dalam mengelolah belanja daerah. Pada tahun 2017 dimana rasionya sebesar 39,35%, mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 41,49%, dan kembali mengalami penurunan menjadi 21,24% pada tahun 2019.

Tabel 5
Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tahun	Belanja Operasi (Tidak Langsung)	Lebih Besar/Lebih Kecil	Belanja Modal (Langsung)	Kriteria
2017	60,50%	>	39,35%	Tidak baik
2018	58,50%	>	41,49%	Tidak baik
2019	78,69%	>	21,24%	Tidak baik

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa realisasi total belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dari tahun 2017 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Ngada sebesar Rp.681.613.666.177,48 naik menjadi Rp.739.148.645.073,46 pada tahun 2018 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp.829.096.229.321,51.

Total realisasi belanja daerah kabupaten ngada yang terdiri atas: Belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Sedangkan Total Reailsasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2019 sedangkan tahun 2018 mengalami peningkatan.

Dari tabel 3 dan 4 itu juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan diatas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk

kepentingan publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali dengan interval 6,99%-8,19%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Ngada pada tahun 2017 dan tahun 2018 tergolong tidak efektif. karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%, dan pada tahun 2019 tergolong efektif.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan Daerah Kabupaten Ngada dapat dikatakan bahwa kurang efisien karena dari tahun 2017 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing adalah sebesar 82,81%, 97,02% dan 98,86%.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada kurang memperhatikan pembangunan daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Selain itu pemerintah daerah harus mencari alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber- sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor potensial. Selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari

pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitia ndilingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Eka, Cida. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Emba. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Fitriya, Agustin. 2012. "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)." Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Halim, Abdul. 2016. Akuntansi Sektor Publi: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendro, Sumarjo. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Mahsun, Mohammad. 2011. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2016. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marturus, Nanang. 2011. Metode Penelitian kuantitatif. Jakarta: PT Ray Grafinda Persada
- Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sutama. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Kartasura: Fairuz Media.
- Widodo. 2001. Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP YKPN.